



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2021

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mempunyai arti strategis karena Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.

Semarang, Agustus 2020
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700729 199603 1 001

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2021.

Semarang, Agustus 2020
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700729 199603 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah merupakan organisasi yang memiliki urusan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah wajib membuat perencanaan dalam setiap tahunnya yang tertuang dalam rencana kerja (Renja).

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan, Dokumen perencanaan yang wajib dan ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Dokumen operasional tahunan atau jangka pendek. Selanjutnya OPD sebagai stakeholder dengan berpedoman pada RPJMD menyusun Renstra dan Renja .

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Untuk mewujudkan capaian diatas maka disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Jawa Tengah tahun 2021 sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun 2021 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah senantiasa mengacu kepada peraturan Perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.
23. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/0000549 tanggal 15 Januari 2020 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
24. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.24/0003834 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 dan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/kegiatan dalam rangka menacapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 adalah :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatifnya untuk tahun 2021

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun 2021

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020. Terkait dengan hal tersebut, Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0 00 01	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100						100		
0 00 01 001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah (jenis)	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00
0 00 01 002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah.	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00
0 00 01 003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik perangkat daerah.	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00
0 00 01 004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah.	60		12	12	100,00	20,00	12,00	12	100,00
0 00 01 005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan pelayanan perkantoran perangkat daerah.	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00
0 00 01 006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah perangkat daerah.	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00
0 00 01 007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan, minum rapat perangkat daerah.	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00
0 00 01 008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan / Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan / buku perpustakaan perangkat daerah.	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00
0 00 01 009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas / Gedung Kantor / Kendaraan	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan / rumah dinas /	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020				
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
		Dinas / Operasional Perangkat Daerah	gedung kantor / kendaraan dinas / operasional perangkat daerah.											
0	00	01	010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin / berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah.	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00
0	00	01	011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah.	5		1	1	100,00	20,00	1,00	0	0,00
0	00	01	013	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan.	9		0	0	0,00	0,00	5,00	0	0,00
0	00	01	014	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan.	300		0	0	0,00	0,00	100,00	100	100,00
0	00	01	015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat / workshop / bintek / seminar.	1200		240	240	100,00	20,00	240,00	0	0,00
0	00	01	016	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah.	5		1	1	100,00	20,00	1,00	0	0,00
0	00	01	023	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	60		12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00
0	00	02		Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100						100,00	100	100,00
0	00	02	001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun.	50		10	10	100,00	20,00	10,00	6	60,00
0	00	02	002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.	50		10	10	100,00	20,00	10,00	5	50,00
0	00	02	004	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Kesbangpol										
					Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan	7400		0	0	0,00	0,00	1700,00	250	14,71
					Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ketahanan Bangsa	4600		0	0	0,00	0,00	1000,00	80	8,00
					Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Politik Dalam Negeri	9500		0	0	0,00	0,00	2500,00	290	11,60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020		
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		Jumlah Capaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Pembinaan Kesbangpol	35		0	0	0,00	0,00	35,00	0	0,00	
1	05	15		Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan	Persentase Penanganan Kejadian Terkait Konflik Sosial	100				100,00	100	100,00
1	05	15	001	Penanganan Konflik Sosial								
				Jumlah laporan konflik sosial	15	3	3	100,00	20,00	3,00	2	66,67
				Jumlah laporan konflik yang tertangani.	726	134	128	95,52	17,63	150,00	76	50,67
				Jumlah masyarakat yang ikut dalam Penyelesaian konflik sosial.	2180	280	280	100,00	12,84	400,00	160	40,00
				Jumlah Pemetaan/ Mapping Potensi Konflik Sosial	5	1	1	100,00	20,00	1,00	0	0,00
				Persentase masyarakat yang paham terhadap Kewaspadaan dan Deteksi Dini	90				81,00	88,16		108,84
1	05	15	002	Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini								
				Jumlah kunjungan VIP/VVIP tertangani	88	8	8	100,00	9,09	20,00	5	25,00
				Jumlah Dukungan Pengamanan Pemilu	64	1	1	100,00	1,56	21,00	0	0,00
				Jumlah Unjuk rasa tertangani	1550	300	289	103,81	18,65	300,00	0	0,00
				Jumlah pantauan orang asing.	30200	5.200	5.792	111,38	19,18	6000,00	0	0,00
				Jumlah laporan deteksi dini	60	12	12	100,00	20,00	12,00	6	50,00
				Jumlah Kader Resolusi Konflik Yang Terbentuk	6900	1.100	1.100	100,00	15,94	1100,00	200	18,18
				Persentase masyarakat yang paham terhadap Ideologi Pancasila dan Wasbang	90				81,00	91,03		112,38
1	05	15	003	Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan								
				Jumlah masyarakat yang paham	5100	600	600	100,00	11,76	900,00	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020		
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		Ideologi Pancasila										
		Jumlah Masyarakat yang paham Wasbang dan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa	5925		500	500	100,00	8,44	1300,00	0	0,00	
		Jumlah Kader Pancasila yang terbentuk	2025		150	150	100,00	7,41	450,00	0	0,00	
		Jumlah Kader Gerakan Nasional Revolusi Mental yang terbentuk	3055		550	550	100,00	18,00	600,00	300	50,00	
		Jumlah Kader Bela Negara yang terbentuk	2125		250	250	100,00	11,76	450,00	240	53,33	
		Jumlah Masyarakat yang mengikuti Apel Kebangsaan	130000		130.000	130.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	
1	05	15	004	Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan								
				Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan	160							
				Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembangunan Karakter Bangsa dan Ideologi Pancasila	300							
				Jumlah Pengendalian Capaian Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan	35							
1	05	16		Program Penguatan Ketahanan Bangsa	90				81,00	90,15	111,30	
1	05	16	001	Penguatan Ketahanan Ekonomi								
				Jumlah laporan fasilitasi/ Pembinaan/ Monev Bidang Ketahanan Ekonomi	385							
				Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi	6570							
						105	105	100,00	27,27	70,00	35	50,00
						770	770	100,00	11,72	1350,00	280	20,74

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Kemitraan dengan ormas dalam rangka peningkatan kapasitas Masyarakat Bidang Ketahanan Ekonomi	130		0	0	0,00	0,00	20,00	5	25,00
		Jumlah Kajian Strategik atas Pemetaan/ Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa di Jawa Tengah	39		6	6	100,00	15,38	7,00	0	0,00
1	05	16	002	Penguatan Ketahanan Seni Budaya dan Etnisitas							
		Jumlah Fasilitasi Gelar Seni dan Budaya Daerah	263		49	49	100,00	18,63	49,00	4	8,16
		Jumlah Pembinaan Etnis dengan Negara	1120		160	160	100,00	14,29	240,00	240	100,00
		Jumlah Pembinaan Dalam Rangka harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya	2160		160	160	100,00	7,41	480,00	320	66,67
		Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Penguatan Generasi Muda Lintas Etnis	1520		160	160	100,00	10,53	240,00	0	0,00
1	05	16	003	Penguatan Toleransi umat beragama dan pemberdayaan Ormas.							
		Jumlah orang yang dilakukan pembinaan dalam rangka pemeliharaan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan	1920		320	320	100,00	16,67	400,00	160	40,00
		Jumlah Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan yang difasilitasi	1120		160	160	100,00	14,29	240,00	80	33,33
		Jumlah orang yang difasilitasi Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan	2200		320	320	100,00	14,55	320,00	0	0,00
1	05	16	004	Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Ketahanan Bangsa							
		Jumlah Masyarakat yang terlibat	500		500	500	100,00	100,00	0,00	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020			
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
		dalam Pembinaan Ketahanan Ekonomi											
		Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ketahanan Masyarakat	440		440	440	100,00	100,00	0,00	0	0,00		
		Jumlah Pengendalian Capaian Program Penguatan Ketahanan Bangsa	35		35	35	100,00	100,00	0,00	0	0,00		
1	05	17	Program Penguatan Politik Dalam Negeri	Persentase masyarakat yang paham terhadap Aspek-Aspek IDI	90				81,00	86,53	106,83		
1	05	17	001	Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik									
				Jumlah Masyarakat yang ikut Pendidikan Politik Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD'45	16600		1.800	1.800	100,00	10,84	3200,00	800	25,00
				Jumlah Masyarakat yang ikut Sosialisasi Penanganan dampak Pemilu/Pilkada	2560		210	210	100,00	8,20	550,00	70	12,73
				Jumlah Kader Partai Politik yang terdidik	1960		300	300	100,00	15,31	500,00	0	0,00
				Jumlah Masyarakat Yang Ikut Sosialisasi Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada	2480		400	400	100,00	16,13	600,00	0	0,00
1	05	17	002	Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik									
				Jumlah Pemilih Pemula yang ikut Pendidikan Politik	16700		1.300	1.300	100,00	7,78	3300,00	560	16,97
				Jumlah Ormas dan Toma/ Toga yang ikut Penguatan Peran Politik	1360		80	80	100,00	5,88	240,00	0	0,00
				Jumlah Fasilitasi Forkopimda	2500		500	500	100,00	20,00	500,00	0	0,00
				Hasil Pendataan Parpol	175		35	35	100,00	20,00	35,00	0	0,00
				Jumlah Parpol yang terlibat dalam pelatihan penatausahaan Bantuan Keuangan Parpol	2000		400	400	100,00	20,00	400,00	0	0,00
				Jumlah Pengembangan Demokrasi	1900		200	200	100,00	10,53	400,00	0	0,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 berdasarkan LAKIP 2019 yang sudah disusun menetapkan dua sasaran strategis, dua indikator kinerja. Pelaksanaan program/ kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2019 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir Desember 2019 pencapaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 93,65%. Pencapaian hasil realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

No	Indikator	Target SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa											
	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	-	-	80	81	83	86	88,41	90,6	83	86	-
2	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik											
	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	-	-	80	81	83	86	87,49	86,53	83	86	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

A. Kinerja Pelayanan OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah merupakan institusi teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta membangun sistem politik yang demokratis guna mewujudkan program pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.

Pada tahun 2021 sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Tahun 2018-2023, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa
- b. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik.

Pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan 6 program dan 9 kegiatan.

B. Permasalahan yang Dihadapi

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jawa Tengah pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tugas, pokok dan fungsi serta dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 adalah :

1. Bidang ideologi dan Kewaspadaan Nasional:
 - a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
 - b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang bersifat anarkis;
 - c. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
 - d. Terhitung 6 kasus konflik keagamaan pada masa pandemi terkait penolakan jenazah maupun kegiatan keagamaan.
 - e. Meningkatnya gangguan kamtibmas terutama terhadap narapidana yang mendapat asimilasi akibat masa pandemi Covid 19 yang kembali melakukan tindakan pidana.
2. Bidang Ketahanan Bangsa:
 - a. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;

- b. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
 - c. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;
 - d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
 - e. Terdapat 12 kejadian konflik sosial dalam penyaluran Bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19.
3. Bidang Politik Dalam Negeri :
- a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
 - b. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional;
 - c. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu;
 - d. Terjadi pengunduran pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, karena masa pandemi Covid 19, sehingga Dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020, terdapat 208 Kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada bulan Februari 2021 mengakibatkan adanya kekosongan Kepala Daerah.

C. Tantangan dan Peluang

Adapun tantangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah antara lain:

- a. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa dan restorasi sosial budaya serta stabilitas Jawa Tengah dalam rangka memantapkan ideologi dan wawsan kebangsaan;
- b. Belum tertatanya struktur politik, pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis;
- c. Masih terdapat konflik perebutan dalam pengelolaan sumber daya alam (termasuk pesisir) di masyarakat sebagai dampak meningkatnya kegiatan penggalian, pertambangan dan industri;
- d. Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat.
- e. Masih adanya sikap diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di masyarakat.
- f. Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan secara salah.

Dari tantangan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki sejumlah peluang sebagai berikut:

- a. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Kesadaran masyarakat untuk menjaga eksistensi bangsa melalui peningkatan wawasan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini;
- c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat Jawa Tengah dalam berpolitik saat ini terus tumbuh;
- d. Semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat;
- e. Stabilitasnya sistem politik Jawa Tengah sehingga memberikan ruang bagi pengembangan sistem politik yang demokratis.

D. Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti

Untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di Jawa Tengah tersebut diperlukan solusi atau rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun rekomendasi yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
2. Memberikan pemahaman akan pentingnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi terkait etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik, di masyarakat.
4. Meningkatkan Kinerja Pokja IDI untuk menyusun Rencana Aksi guna peningkatan skor IDI;
5. Peningkatan penggunaan Media Sosial dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila; partisipasi politik dan Wawasan Kebangsaan;
6. Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait agar tidak terjadi kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.
7. Melakukan sosialisasi mengenai pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat;
8. Koordinasi dan kerjasama antara Badan Penyelenggara Pemilu dan aparat terkait dalam rangka antisipasi isu negatif yang berkembang;
9. Perlu tindakan tegas terhadap pelaku dugaan money politic;
10. Koordinasi antara Badan Penyelenggara Pemilu dan instansi terkait mengenai jumlah DPT.
11. Pemerintah perlu menyediakan tempat bagi masyarakat untuk dapat berekspresi dengan bebas dan tertib tanpa mengganggu kenyamanan pihak lain;

12. Lebih memperhatikan fasilitas bagi kelompok disabilitas dan lansia
13. Kaderisasi yang baik dalam partai-partai politik sehingga dapat menghasilkan politisi-politisi yang berintegritas dan kompeten;
14. Koordinasi bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, FKUB dan Ormas Keagamaan dalam menciptakan sikap toleransi menghadapi pandemi Covid-19.
15. Melakukan sinergitas dalam Penanganan Konflik Sosial dan Peningkatan Deteksi Dini dengan aparat keamanan seiring meningkatnya gangguan kamtibmas pada masa pandemi Covid-19.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Provinsi dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan provinsi.

Berikut Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah :

**Tabel 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Tengah	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wasbang	83%	5.178.001.000	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Tengah	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wasbang	83%	5.178.001.000	
B	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jawa Tengah	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	83%	22.464.195.000	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jawa Tengah	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	83%	22.464.195.000	
C	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jawa Tengah	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	83%	4.790.375.000	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jawa Tengah	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	83%	4.790.375.000	
D	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jawa Tengah	Persentase Penanganan Kejadian Terkait Konflik Sosial	100%	16.422.035.000	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jawa Tengah	Persentase Penanganan Kejadian Terkait Konflik Sosial	100%	16.422.035.000	
			Persentase masyarakat yang paham terhadap Kewaspadaan dan Deteksi Dini	83%				Persentase masyarakat yang paham terhadap Kewaspadaan dan Deteksi Dini	83%		
E	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jawa Tengah	Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI	83%	29.272.190.000	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jawa Tengah	Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI	83%	29.272.190.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan provinsi. Melalui forum tersebut akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk terlalu banyak dari jumlah usulan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang ada. Berikut Usulan Program/Kegiatan Masyarakat hasil telaah :

**Tabel 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
A.	HIBAH SOSIAL KEMASYARAKATAN				
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jawa Tengah	Peningkatan fasilitasi kebutuhan masyarakat	16.670.000.000	Usulan Hibah Sosial Masyarakat dan Hasil Reses/Aspirasi DPRD
B.	HIBAH INSTANSI VERTIKAL				
1.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jawa Tengah	Peningkatan koordinasi instansi vertikal bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	9.096.400.000	Usulan Hibah Instansi Vertikal yang terkait dengan Tupoksi Kesbangpol.
2.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jawa Tengah	Peningkatan koordinasi instansi vertikal bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	20.713.490.000	Usulan Hibah Instansi Vertikal yang terkait dengan Tupoksi Kesbangpol.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah secara struktural dibawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, untuk itu arah kebijakan dari pusat pada tahun 2021 yang sesuai dengan bidang politik dan pemerintahan umum antara lain :

1. Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;
2. Kecenderungan peningkatan konflik sosial; isu ini semakin hangat dimunculkan seiring dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa.
3. Terorisme dan radikalisme; banyaknya warga negara indonesia yang teridentifikasi bergabung dengan kelompok terorisme seperti ISIS
4. Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi
5. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia sekarang bukan lagi merupakan negara transit narkoba tetapi merupakan negara pemakai.
6. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan; seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi, orang semakin luntur dengan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sosialnya.
7. Kualitas demokrasi; nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum
8. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis serba instan dan mengabaikan proses yang berkualitas

Dari kebijakan nasional tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah merumuskan beberapa program prioritas pada tahun 2021 antara lain :

1. Pemetaan terhadap daerah rawan konflik sosial terutama konflik SARA dengan Penguatan Timdu PKS
2. Revitalisasi dan Aktualisaasi Nilai-Nilai Pancasila
3. Pelaksanaan Perda P4GN melalui Penyusunan Pergub, Efektifitas Timdu P4GN, Sosialisasi dan Penyuluhan Perda P4GN

4. Pengawasan Ormas serta Penguatan Timdu Pengawasan Ormas
5. Penguatan Peran dan Fungsi Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah Jawa Tengah
6. Penguatan Peran Toga, Tomas dan Ormas dalam menjaga kerukunan umat beragama
7. Penguatan Partisipasi Politik dan peningkatan peran partai politik

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan sebagai berikut : ” **Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik**”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa
- b. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah beserta indikator kerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik		A. Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa dan politik	Persen	83
		a. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	1. Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Persen	83
		b. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik	2. Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	Persen	83

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesbang Pol Provinsi Jawa Tengah hanya melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik, sedangkan fungsi lain (perlindungan masyarakat) dilaksanakan oleh OPD pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah memiliki rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju 2022		Lokasi	OPD Penanggung Jawab/ Unit Kerja	
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil			Rp	Target			Rp
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8	01 02					Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang	83			Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang	83	5.178.001.000					
8	01 02 1.0 1					Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						5.178.001.000			35 Kabupaten/Kota, BANJARNEGARA, BANYUMAS, Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, BOYOLALI, KARANGANYAR, KEBUMEN, KOTA PEKALONGAN, KOTA SALATIGA, KOTA SURAKARTA, MAGELANG, PATI, REMBANG, SEMARANG, SUKOHARJO,		
								Jumlah Kader Bela Negara yang terbentuk	150			272.500.000	500	670,000,000		SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
								Jumlah Kader Gerakan Nasional Revolusi Mental yang terbentuk	200			177.410.000	670	875,000,000		SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
								Jumlah Kader Pancasila yang terbentuk	300			379.941.000	500	670,000,000		SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
								Jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila	5000			4.000.000.000	1350	1,375,000,000		SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
								Jumlah Masyarakat yang paham Wasbang dan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa	250			348.150.000	1450	1,500,000,000		SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	

Kode				Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju 2022		Lokasi	OPD Penanggung Jawab/ Unit Kerja
							Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil			Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	
8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	83			Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	83	22.464.195.000					
8	01	04	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										22.464.195.000			35 Kabupaten/Kota, Bidang Ketahanan Bangsa,		
								Jumlah Fasilitasi Gelar Seni dan Budaya Daerah		12				100.000.000	55	500,000,000		SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
								Jumlah Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan yang difasilitasi		100				140.000.000	240	252,000,000		SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
								Jumlah orang yang difasilitasi Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan		550				17.954.195.000	520	1,095,000,000		SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
								Jumlah orang yang dilakukan pembinaan dalam rangka pemeliharaan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan		5000				4.000.000.000	400	650,000,000		SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
								Jumlah pembinaan dalam rangka harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya		50				60.000.000	560	670,000,000		SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju 2022		Lokasi	OPD Penanggung Jawab/ Unit Kerja	
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil			Rp	Target			Rp
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
								Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Penguatan Generasi Muda Lintas Etnis	50			60.000.000	400	400.000.000		SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
								Jumlah pembinaan Etnisitas dengan Negara	100			150.000.000	240	323.000.000		SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
8	01	05						Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	83			4.790.375.000					
8	01	05	1.01					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya				4.790.375.000			35 Kabupaten/Kota, Bidang Ketahanan Bangsa,		
								Jumlah Kajian Strategik atas Pemetaan/Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa di Jawa Tengah	8			370.000.000	8	400.000.000		SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI	
								Jumlah Kemitraan dengan ormas dalam rangka peningkatan kapasitas Masyarakat Bidang Ketahanan Ekonomi	100			4.000.000.000	8	560.000.000		SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI	
								Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi	200			315.000.000	250	350.000.000		SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI	

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju 2022		Lokasi	OPD Penanggung Jawab/ Unit Kerja	
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil			Rp	Target			Rp
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
								Jumlah laporan fasilitasi/ Pembinaan/ Monev Bidang Ketahanan Ekonomi	70			105.375.000	210	120.000.000		SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI	
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini	83			16.422.035.000					
								Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100								

Kode				Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju 2022		Lokasi	OPD Penanggung Jawab/ Unit Kerja
							Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil			Target	Rp		
1				2	3	4	5	6	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Rp	Target	Rp	16	17
8	01	06	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										16.422.035.000				35 Kabupaten/Kota, BANJARNEGARA, BANYUMAS, BATANG, Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, BLORA, BOYOLALI, BREBES, CILACAP, DEMAK, GROBOGAN, JEPARA, KARANGANYAR, KEBUMEN, KENDAL, KLATEN, KOTA MAGELANG, KOTA PEKALONGAN, KOTA SALATIGA, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA TEGAL, KUDUS, MAGELANG, PATI, PEKALONGAN, PEMALANG, PURBALINGGA, PURWOREJO, REMBANG, SEMARANG, SRAGEN, SUKOHARJO, TEGAL, TEMANGGUNG, WONOGIRI, WONOSOBO,	
										Jumlah Kader Resolusi Konflik yang terbentuk	350			330.685.000	1800	1000000000		SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	
										Jumlah laporan deteksi dini	12			314.240.000	12	500000000		SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	
										Jumlah laporan konflik sosial	3			9.296.920.000	3	500000000		SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	
										Jumlah laporan konflik yang tertangani	150			1.389.000.000	150	450000000		SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	
										Jumlah masyarakat yang ikut dalam Penyelesaian konflik sosial.	5000			4.000.000.000	600	750000000		SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju 2022		Lokasi	OPD Penanggung Jawab/ Unit Kerja	
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil			Rp	Target			Rp
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
								Jumlah Dukungan Pengamanan Pemilu					7	500000000		SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	
								Jumlah kunjungan VIP/VVIP tertangani	20			707.490.000	15	1310000000		SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	
								Jumlah pantauan orang asing.	6500			175.510.000	6500			SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	
								Jumlah Pemetaan/Mapping Potensi Konflik Sosial	1			76.790.000	1	300000000		SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	
								Jumlah Unjuk rasa tertangani	350			131.400.000	300	100000000		SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	
8	01	03						Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI	83			Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI	83	29.272.190.000			
8	01	03	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										29.272.190.000		35 Kabupaten/Kota, BANYUMAS, BATANG, Bidang Politik Dalam Negeri, BLORA, BREBES, BREBES, CILACAP, KARANGANYAR, KOTA MAGELANG, KOTA PEKALONGAN, KOTA SALATIGA, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA TEGAL, KUDUS, PATI, PURBALINGGA, REMBANG, SEMARANG, TEMANGGUNG, WONOGIRI, WONOSOBO,	

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju 2022		Lokasi	OPD Penanggung Jawab/ Unit Kerja	
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil			Rp	Target			Rp
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
								Hasil Pendataan Parpol	35			20.599.760.000	35	200,000,000		SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK	
								Jumlah Fasilitasi Forkopimda	1200			2.371.810.000	500	2,260,000,000		SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK	
								Jumlah Kader Partai Politik yang terdidik	5000			4.000.000.000	360	500,000,000		SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
								Jumlah Masyarakat yang ikut Pendidikan Politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45	550			966.310.000	4200	3,600,000,000		SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
								Jumlah masyarakat yang ikut Sosialisasi penanganan dampak Pemilu/Pilkada	200			441.460.000	600	1,332,863,000		SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
								Jumlah masyarakat yang ikut Sosialisasi Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada	150			171.030.000	480	580,000,000		SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
								Jumlah Ormas dan Toma/ Toga yang ikut Penguatan Peran Politik	100			116.820.000	480	500,137,000		SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK	
								Jumlah Parpol yang terkitab dalam pelatihan penatausahaan Bantuan Keuangan Parpol	200			216.510.000	400	532,000,000		SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK	
								Jumlah Pemilih Pemula yang ikut Pendidikan Politik	150			158.390.000	4400	3,800,000,000		SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK	
								Jumlah Pengembangan Demokrasi di Jawa Tengah	150			230.100.000	400	380,000,000		SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK	

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 Rp	Prakiraan Maju 2022		Lokasi	OPD Penanggung Jawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil			Target	Rp		
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	X X	01														
X	X X	01	2.0 1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
								Jumlah Capaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Pembinaan Kesbangpol	35				328.120.000			
													35	250,000,000		SUB BAGIAN PROGRAM
								Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	10				615.000.000			
													10	780,000,000		SUB BAGIAN PROGRAM
								Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10				319.825.000			
													10	650,000,000		SUB BAGIAN PROGRAM
								Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan	1350				927.820.000			
													1900	1,700,000,000		SUB BAGIAN PROGRAM
								Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ketahanan Bangsa	1400				880.660.000			
													1200	1,800,000,000		SUB BAGIAN PROGRAM
								Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Politik Dalam Negeri	#REF!				810.560.000			
													1800	2,100,000,000		SUB BAGIAN PROGRAM

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju 2022		Lokasi	OPD Penanggung Jawab/ Unit Kerja	
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil			Rp	Target			Rp
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100					
X	X X	01	2.0 2		Administrasi Keuangan							10.702.500.000			KOTA SEMARANG, OPD Provinsi,		
								Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	12			10.702.500.000	12	11,003,000,000		SUB BAGIAN KEUANGAN	
X	X X	01	2.0 3		Administrasi Umum							4.918.772.000			DKI JAKARTA, KOTA SEMARANG, OPD Provinsi,		
								Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12			25.000.000	12	25,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12			113.000.000	12	200,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12			2.285.000.000	12	2,400,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12			350.000.000	12	400,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar	12			225.000.000	12	250,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju 2022		Lokasi	OPD Penanggung Jawab/ Unit Kerja	
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil			Rp	Target			Rp
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
								daerah									
								Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah.	12			7.000.000	12	7,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	12			285.000.000	12	300,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12			758.256.000	12	1,030,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12			80.000.000	12	90,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12			80.000.000	12	80,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	1			69.300.000	1	60,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan.	2			0	2	450,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
								Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	1			641.216.000	1	178,250,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Kode				Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju 2022		Lokasi	OPD Penanggung Jawab/ Unit Kerja
							Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil			Target	Rp		
1				2	3	4	5	6	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Rp	Target	Rp	16	17
X	X	X	01	2.0 4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										130.000.000		670,000,000	DKI JAKARTA, KOTA SEMARANG, OPD Provinsi,	
											Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop /Bintek/Seminar	160			130.000.000	240	600,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
											Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan.	100			0	100	70,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
															97.760.053.000				

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan. Sehingga nantinya akan dilakukan perubahan target manakala terdapat perubahan anggaran.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan Organisasi Perangkat Daerah dalam kerangka penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya hingga kebawah dan keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dan diiringi peran aktif stakeholder yang ada di Provinsi Jawa Tengah antara lain Instansi Vertikal, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas/LSM, Partai Politik dan Aparat Keamanan. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Demikian yang dapat disampaikan dengan maksud bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 ini wajib menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih optimal, efisien dan akuntabel.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

HAERUDIN, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700729 199603 1 001